

**PRINSIP KEADILAN DALAM PENETAPAN TARIF PAJAK BARANG
DAN JASA TERTENTU ATAS JASA HIBURAN PADA USAHA
KARAOKE KELUARGA DI JAKARTA**

Sevia Wulandari¹, Anugrah Anditya²

INTISARI

Pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar, namun penetapan tarif pajaknya harus mempertimbangkan prinsip keadilan agar tidak memberatkan pelaku usaha, khususnya skala usaha seperti karaoke keluarga. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis prinsip keadilan dalam penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan pada usaha karaoke keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) serta Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan pada usaha karaoke keluarga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan. Tarif pajak yang tinggi dapat menjadi beban bagi pelaku usaha, sehingga mempengaruhi daya saing dan keberlanjutan usaha.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan fleksibel untuk menyesuaikan tarif pajak dengan karakteristik usaha dan kapasitas ekonomi usaha. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum juga menjadi penting untuk memastikan kepatuhan pajak tanpa menimbulkan ketidakadilan. Penulisan ini memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menetapkan tarif pajak barang dan jasa tertentu atas jasa hiburan pada usaha karaoke keluarga secara adil agar dapat meningkatkan PAD tanpa menghambat pertumbuhan sektor usaha karaoke keluarga.

Kata Kunci: Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Hiburan, Prinsip Keadilan, Karaoke Keluarga

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Pajak Universitas Gadjah Mada

The Principle of Fairness in Determining the Tax Rate on Specific Goods and Services for Entertainment Services in Family Karaoke Businesses in Jakarta

Sevia Wulandari, Anugrah Anditya

ABSTRACT

The tax on certain goods and services for entertainment services is one of the sources of Regional Original Revenue (PAD) with significant potential. However, the determination of tax rates must consider the principle of fairness to avoid burdening business actors, especially small-scale enterprises such as family karaoke businesses. This study aims to analyze the principle of fairness in the determination of tax rates on certain goods and services for entertainment services in family karaoke businesses, based on Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD) and Regional Regulation of the Special Capital Region of Jakarta Province Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Regional Levies.

This research adopts a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The data used consist of primary data from interviews and secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively. The results show that the current tax rate on certain goods and services for entertainment services in family karaoke businesses does not fully reflect the principle of fairness. High tax rates can become a burden on business actors, thereby affecting competitiveness and business sustainability.

Therefore, more adaptive and flexible policies are needed to adjust tax rates according to the business characteristics and economic capacity of the enterprises. Optimizing supervision and law enforcement is also essential to ensure tax compliance without creating unfairness. This study recommends that the government set fair tax rates on certain goods and services for entertainment services in family karaoke businesses to increase PAD without hindering the growth of the family karaoke sector.

Keywords: *Specific Goods and Services Tax (PBJT) for Entertainment Services , Fairness Principle, Family Karaoke Business*